

LAYANAN PENERBANGAN BATIK AIR DARI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi (kiri) didampingi Direktur Operasi Batik Air Capt. Zwingly Silalahi (kanan) berbicara dengan pramugari saat pembukaan layanan penerbangan di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (6/9). Batik Air mulai 6 September 2022 membuka kembali layanan penerbangan dan operasional Halim Perdanakusuma Jakarta (HLP) dengan tujuan Medan, Padang, Palembang, Bengkulu, Semarang, Malang, Surabaya, Yogyakarta dan Bali.



FOTO/ANT



BPR SUPRA
PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Utilisasi Industri Kulit dan Alas Kaki Menanjak Hingga 84,49 Persen

Nilai ekspor kulit, barang jadi kulit dan alas kaki sampai dengan Juni tahun 2022 mencapai USD4,62 miliar atau naik 41,26% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya sebesar USD3,26 miliar.

JAKARTA (IM) - Industri kulit, barang jadi kulit dan alas kaki tumbuh positif sebesar 13,12% pada triwulan II tahun 2022. Kinerja gemilang ini masuk dalam tiga besar di sektor industri pengolahan karena didorong tingginya permintaan ekspor serta daya tarik investasi

yang semakin baik dan pengalihan order dari beberapa brand global ke Indonesia. "Utilisasi industri kulit, barang jadi kulit dan alas kaki juga mengalami kenaikan sebesar 84,49% pada bulan Juli 2022 apabila dibandingkan dengan utilisasi sebelum pandemi sekitar

80,18%," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (6/9). Nilai ekspor kulit, barang jadi kulit dan alas kaki sampai dengan Juni tahun 2022 mencapai USD4,62 miliar atau naik 41,26% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya sebesar USD3,26 miliar. Dari nilai tersebut, distribusi ekspor berupa alas kaki sebesar 86%, barang jadi kulit 13%, dan kulit samak 1%. Bahkan, di tengah dinamika global dan dampak pandemi Covid-19, sektor industri terus menunjukkan geliatnya melalui perkembangan positif dari Purchasing Managers Index (PMI)

manufaktur Indonesia. PMI manufaktur Indonesia sebesar 51,7 poin pada Agustus 2022, naik dibandingkan bulan Juli sebesar 51,3 poin. "Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur nasional masih berada pada level ekspansif, sehingga Indonesia optimis dalam menilai prospek ekonomi ke depan di sektor industri manufaktur," tutur Agus. Guna menjaga industri alas kaki, kulit dan barang jadi kulit pada level ekspansif, pemerintah melakukan berbagai program strategis, di antaranya melalui program substitusi impor 35% tahun 2022, dengan tujuan mendorong peningkatan utilisasi

industri existing sekaligus peningkatan investasi di Indonesia, baik investasi baru maupun perluasan. Berikutnya, implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), percepatan transformasi menuju industri 4.0 dengan memanfaatkan beberapa teknologi kunci seperti artificial intelligence dan internet of things (IoT), serta peningkatan kemampuan SDM industri. Selain beberapa program tersebut, salah satu langkah yang juga rutin dijalankan adalah promosi dan pengenalan produk alas kaki, kulit dan barang jadi kulit khususnya di pasar do-

estik. Contohnya, penyelenggaraan Pameran Sepatu Kulit dan Fashion 2022. "Pameran ini merupakan upaya yang tepat sebagai sarana pengenalan produk dan business matching industri, sebagai jembatan antar sesama pelaku usaha (B2B) dan antar pelaku usaha dengan konsumen (B2C), serta sebagai sarana untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada sektor kulit, barang jadi kulit dan alas kaki," papar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian saat membuka Pameran Sepatu Kulit dan Fashion 2022 di Jakarta, Selasa (6/9).

Pada kesempatan ini, dilaksanakan MoU antara produsen alas kaki nasional yang diwakili Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) dengan produsen kulit dalam negeri yang diwakili Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI). Tujuan kerja samaini untuk meningkatkan keterkaitan antar industri serta upaya untuk menyukseskan program substitusi impor. "MoU ini juga untuk memastikan agar rantai pasok antara hulu dan hilir dari industri sepatu dalam negeri benar-benar terwujud," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ignatius Warsito. • dro

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2022, ACE Hadirkan Program Apresiasi Pelanggan

JAKARTA (IM) - PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACE) turut memeriahkan perayaan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) dengan memberikan apresiasi kepada pelanggan melalui program LIGA (Leaders in Greeting Action) yaitu temu wicara langsung antara manajemen ACE mulai dari Komisaris, Direktur, hingga Manajer Toko yang berlangsung di 17 kota di Indonesia sepanjang September. Dari salah satunya telah dilakukan di ACE Living World Alam Sutera, Tangerang, Minggu (4/9).

Direktur PT ACE Hardware Indonesia Tbk, Teresa Wibowo mengatakan, ACE menghadirkan rangkaian program, salah satunya program LIGA. Lewat program ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dari pelanggan. Dengan demikian ACE selalu meningkatkan layanan dan memberikan customer shopping experience yang baik, serta selalu menghadirkan



Manajemen ACE sedang berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Manajer Toko yang berlangsung di 17 kota di Indonesia sepanjang September. Dari salah satunya telah dilakukan di ACE Living World Alam Sutera, Tangerang, Minggu (4/9).

kan inovasi layanan, salah satunya dengan pengembangan dalam omnichannel experience. "Melalui kehadiran lebih dari 220 toko di 52 kota di seluruh Indonesia, kami terus berupaya untuk hadir lebih dekat memberikan solusi kebutuhan rumah dan gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tren di masyarakat. Harpelnas ini menjadi momen istimewa bagi ACE untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pelanggan selama 27 tahun hadir di Indonesia," kata Teresa.

Sesuai dengan tagline 'The Helpful Place', ACE juga memberikan solusi kemudahan dan kenyamanan untuk berbelanja. Selain dengan belanja offline di toko ACE, pelanggan dapat berbelanja secara online melalui aplikasi MISS ACE, Ruperupa-

com dan ACE Online di laman www.acehardware.co.id/shop. Hal ini juga didukung dengan layanan puna jual yaitu fitur integrated contact center ASK ACE yang dapat diakses melalui telepon, WhatsApp chat, email, dan live chat untuk membantu

menjawab pertanyaan pelanggan. Pelanggan juga dapat menikmati fasilitas gratis pengiriman barang, gratis instalasi produk tertentu, gratis pengembalian atau penukaran barang hingga 14 hari, serta penyediaan layanan bantuan atau service center.

ACE juga menghadirkan penawaran berlimpah yang dapat dinikmati oleh pelanggan hingga 27 September 2022 dalam program 'Belanja Lengkap Banyak Untungnya'. Spesial untuk member ACE Rewards, ACE berikan keuntungan lebih melalui program 'Bayar Pakai 1 Poin, Hemat hingga 60%'. Khusus member dengan transaksi mulai dari Rp1,5 juta di aplikasi MISS ACE, Ruperupa.com, dan ACE Online dapat menikmati cashback hingga Rp990 ribu. Pada tahun ini, ACE dianugerahi beberapa penghargaan atas komitmen, inovasi dan strategi perusahaan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan salah satunya yaitu Service Quality Award untuk ke-12 kalinya. Hal ini berkat dukungan pelanggan setia atas program-program yang dijalankan oleh ACE. • vit

Dilema Rp500 Triliun: untuk BBM atau si Miskin?

JAKARTA (IM) - Apa pun keputusan yang dibuat pemerintah terhadap subsidi BBM pastilah akan memberikan dampak yang menyakitkan. Tetapi lebih baik menghapus subsidi daripada mempertahankannya. Seperti dilansir dari siaran pers tertulis Kabid Diskusi & Publikasi ANN (Asosiasi Noto Negara) Suprapti Widiasih, SE., MA, Selasa (6/9), dalam Webinar bertajuk BBM atau UMKM yang diselenggarakan ANN pada Rabu (31/8) malam lalu, Ketua AAKI (Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) Dr. Totok Hari Wibowo mengatakan bahwa menunda menghapus subsidi hanyalah menunda masalah.

Menurut Totok, kenaikan harga-harga barang setelah kenaikan harga BBM hanyalah fenomena sementara, yang bisa dikelola dengan jaring pengaman atau bantalan sosial.

Uang subsidi BBM senilai Rp500 - Rp700 triliun lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan tepat sasaran, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya pemerintah wajib melakukan reformasi besar-besaran terhadap tata-kelola migas yang masih menyimpan bolong-bolong di sana-sini.

Sebagai pegawai di Kemendagri, dia menilai bahwa kegiatan berbagai instansi pemerintah masih sangat tidak terkoordinasi. Seringkali mereka membuat kesepakatan, tapi tidak satu pun instansi yang kemudian bekerja merealisasikan kesepakatan itu.

Reformasi tata-kelola ataupun birokrasi pada umumnya itu diami oleh Dr. Hempri Suyatna (UGM).

Dia mempertanyakan manajemen Pertamina, termasuk



struktur gaji para pegawai dan pejabatnya, mungkin bisa diperbaiki lagi untuk efisiensi. Dengan efisiensi pengelolaan, maka bisa saja subsidi dipertahankan. Pilihan lain adalah membatasi subsidi BBM bagi orang miskin saja. Untuk itu pangkalan data harus benar-benar cermat dan bersih, sehingga tidak bisa dislewatkan, termasuk untuk kepentingan politik. Sementara itu Yakob Nohani (UNG) cenderung menolak kenaikan harga BBM alias pencabutan subsidi. Dia melihat masih banyak hal yang dapat dibenahi di dalam birokrasi maupun tata-kelola pemerintah secara keseluruhan. Dia menyoroti, misalnya, fungsi pemprov yang merupakan pemerintah otonom tapi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini duplikasi dan tidak efisien. Mengapa pemprov

tidak dijadikan wakil pemerintah pusat saja? Jadi tidak perlu ada dinas-dinas provinsi, hemat biaya. Biarlah otomi daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, didukung oleh pemerintah pusat. Pemprov mengkoordinir dan mengarahkan gerak pembangunan di provinsi masing-masing, menyatukan apa kemauan pemerintah pusat dan pemkab/pemkot beserta masyarakatnya. Webinar ANN kali ini diikuti oleh 13 peserta, dengan moderator Suprapti Widiasih (STIAM). Selain mendiskusikan kenaikan harga BBM, peserta juga menyinggung peran analis kebijakan dalam perumusan kebijakan. Ini dipertanyakan oleh Dr. Sukarso (UNSOED). Menanggapi hal ini Totok

mengatakan, bahwa analisis kebijakan sebenarnya memegang peran yang krusial dalam pembuatan kebijakan di berbagai instansi pemerintah. Tapi seringkali mereka terpinggirkan dalam proses tersebut. Kebijakan seringkali lebih bernuansa politis (untuk kepentingan kelompok) daripada evidence-based yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Beberapa peserta lain yang turut menyemarakkan diskusi ini di antaranya Sunarto (UINSA), Haryono (POLKESYO), Ambar Teguh Sulistyani (UGM), Firdaus (USN), Rosidah (UNY), Sunarto (UINSA) dan Raina Dwi Miswara (ANN). Peserta yang terakhir ini di luar forum mempertanyakan, kenapa tiba-tiba ada wacana penghapusan subsidi BBM? Bukankah kita telah dua tahun ini tidak banyak mengonsumsi BBM karena pandemi, yang artinya anggaran subsidi telah banyak dihemat selama dua tahun ini? Tampaknya memang kebijakan ini perlu dirumuskan secara terbuka-partisipatif. Ketua ANN Samodra Wibawa mengatakan, bahwa setiap kebijakan memang akan menimbulkan kerugian atau hilangnya kenikmatan bagi sekelompok masyarakat. Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua kelompok. Pasti ada ongkos yang harus dibayar. Untuk itu, agar semua pihak bisa menerima keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah, semua pihak perlu diajarkan bagaimana menerima keputusan dengan terbuka. Tidak hanya DPR tapi juga ormas dan berbagai kelompok kepentingan lain perlu didengar suaranya. • kris

Agar Kinerja Pj. Bupati Efektif dan Efisien, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Minta Pemkab Segera Selesaikan Proses Perizinan



Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Hj. Ani Rukmini, M. I. Kom.

CIKARANG PUSAT (IM) - Agar kinerja Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan bisa efektif dan efisien, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hj. Ani Rukmini meminta sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi agar segera mengisi kursi kosong pimpinan SKPD dengan kelantik pejabat definitif. Terlebih, permasalahan kekosongan itu sudah terjadi agak lama, sejak dari kepala-kepala daerah sebelumnya. "Hal itu memang sudah terjadi sejak

bupati terdahulu dan kemudian akhirnya makin dipersulit karena itu Pj. (penjabat-red) karena, status Pj kewenangannya agak terbatas. Jadi, dia harus izin ke Kemendagri," ujar Ani saat dikonfirmasi lewat telepon genggamnya, Selasa (6/9). Tetapi, sambungnya, informasi yang dia dapat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahwa hal itu sudah on process, sedang diminatkan perizinannya ke Kemendagri untuk Pj. Bupati melakukan promosi dan mutasi. Artinya, sebutnya lagi, sudah ada progress sebetulnya dari sebelumnya. "Karena himbauan kami, namanya kewenangan multi terbatas, proses perizinan kalau bisa harus dituntaskan semuanya paling tidak, sampai masa jabatan Pj. Bupati selesai atau sampai dengan terpilihnya bupati yang baru sehingga roda birokrasi di Kabupaten Bekasi bisa lebih stabil. Itu harapannya," imbuhnya. Ditanya terkait kinerja Pj. Bupati selama ini, ia mengatakan legislatif memandangnya sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki harus menyesuaikan. Dia memiliki kewajiban yang sama layaknya kepala daerah (definitif) hanya saja kewenangannya terbatas. Karena, tambahnya, untuk melakukan keputusan, kebijakan strategis apakah itu promosi, rotasi pada tataran kepala dinas atau keputusan strategis lainnya, dia (Pj. Bupati-red) harus melakukan proses perizinan melalui gubernur. "Yang jelas sih, Pj. Bupati, tidak terlalu banyak seremoni lah. Dia langsung tak.. tak.. tak, apa yang mau dibenahi. Tinggal bagaimana eksekutif bisa mengikuti. Dia enggak banyak seremoni, begitu, ya. Dia lebih banyak berfikir gimana nih pada masa penugasan beliau sebagai Pj pembangunan berjalan. Begitu saja," aku politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (ADV)